

Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum



HUKUM KEUANGAN NEGARA



- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/Pmk.02/2012
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007
- Konsolidasi-Perpres-54-th-2010
- Putusan sidang 1695 35 PUU 2013 UU KeuNeg UU MD3 telah ucap 22 Mei 2013

Hukum Keuangan Negara
Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum

GWI 703.14.4.042
ISBN 978-602-251-706-1
© Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang

Desainer sampul & Penata isi: Gun
Diterbitkan pertama kali oleh Penerbit PT Grasindo, anggota Ikapi,
Jakarta, 2014

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun (seperti cetakan, fotokopi, mikrofilm, VCD, CD-ROM, dan rekaman suara) tanpa izin tertulis dari pemegang hak cipta/Penerbit.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
 2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-



KOMPAS GRAMEDIA

Dicetak oleh Percetakan PT Gramedia, Jakarta

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Kata Pengantar

Transformasi tata kelola pemerintahan saat ini semakin mengarah pada penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis tata kelola pemerintahan yang baik (*the principles of good administration*). Pengaturan dalam sistem hukum keuangan negara berbasis tata kelola keuangan negara yang baik merupakan suatu *conditio sine qua non* untuk mengawal reformasi birokrasi. Penerbitan buku ini merupakan revisi dengan beberapa penambahan substansial dari buku sebelumnya dengan harapan agar buku ini bisa semakin komprehensif dalam memenuhi kebutuhan akademis para pembaca dan peminat hukum keuangan negara.

Buku ini mencoba menyajikan secara komprehensif sisi-sisi penting pembaruan dalam prinsip dan tata kelola keuangan negara, dengan tidak meninggalkan pendekatan yang multi disiplin, supaya perspektif keuangan negara dapat ditelaah secara lengkap. Tidak ketinggalan pula, analisis dalam buku ini juga melihat sisi keuangan daerah melalui metode transfer fiskal ke daerah, dalam rangka menyeimbangkan kapasitas fiskal Pusat dan Daerah. Masih minimnya terbitan buku menyangkut pembaruan paradigma hukum pengelolaan keuangan negara menjadi salah satu alasan penting untuk mempelajari dengan seksama buku ini.

Diharapkan buku ini bisa dimanfaatkan secara luas baik oleh komunitas kampus maupun praktisi pemerintahan sebagai salah satu pegangan dalam memahami maupun mengelola keuangan negara. Semoga buku ini bisa turut memberikan dorongan secara teoretis dalam membawa sistem pemerintahan negara ini menjadi lebih baik berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Buku ini didedikasikan untuk pengembangan akademik dan keilmuan hukum administrasi negara khususnya di bidang Hukum Keuangan Negara.

Tentu buku ini tidak lepas dari kekurangan di sana sini, meskipun penulis mencoba menggarap penulisannya secara berhati-hati. Masukan konstruktif dari sidang pembaca yang budiman akan menyempurnakan buku ini dalam proses revisi selanjutnya.

Yogyakarta, Juni 2013

Penulis